**BAB II**

**KEBERADAAN IMIGRAN DI PERANCIS**

1. **Imigran**
2. **Pengertian Imigran**

Dalam dunia hubungan internasional saat ini, masyarakat tidak hanya berinteraksi sesama masyarakat senegaranya saja, namun dengan globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini masyarakat sudah berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda negara, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi yang dilakukan terkadang dengan alasan yang berbeda-beda seperti motif ekonomi, politik, militer, sosial, konflik maupun olahraga. Tidak hanya interaksi, terkadang ada beberapa masyarakat yang sengaja pindah dari negara asalnya ke negara lain, hal ini juga dilakukan dengan alasan ekonomi, sosial, ataupun keamanan dan lain sebagainya. Mereka yang pindah tersebut disebut dengan imigran.

Imigran ialah pelaku imigrasi, sedangkan imigrasi merupakan proses masuknya warga negara asing (*non-national*) ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap.[[1]](#footnote-2) Pengertian umum imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya.

Walaupun migrasi manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, konsep modern imigrasi, khususnya pada abad ke 19, terkait dengan perkembangan negara-bangsa dengan kriteria kewarganegaraan yang jelas, paspor, pengawasan perbatasan permanen, serta hukum kewarganegaraan. Kewarganegaraan dari suatu negara memberikan hak-hak khusus kepada penduduk negara tersebut, sementara para imigran dibatasi oleh hukum imigrasi. Negara-bangsa membuat imigrasi menjadi suatu isu politik; per definisi ia adalah tanah air suatu bangsa yang ditandai oleh kesamaan etnis dan/atau budaya, sedangkan imigran memiliki etnis dan budaya yang berbeda. Hal ini kadang menyebabkan suatu ketegangan social, xenofobia, dan konfik identitas nasional pada banyak negara maju.

Ada pula Anggota Keimigrasian, atau pegawai/petugas Imigrasi yang setiap bertempatan di tempat-tempat kedatangan dan keberangkatan internasional. Tugas Anggota Imigrasi guna untuk menjaga dan melaksanakan tugas untuk mengawasi datangnya dan perginya suatu warga/orang dengan melihat/mensahkan identitas orang tersebut yang akan bepergian keluar negeri. Juga memiliki tugas untuk mengawasi orang yang datang dari luar negeri ke negeri Imigrasi itu sendiri, tugas Keimigrasian antara lain untuk juga melihat dan menidentifikasi datangnya orang itu ke negeri imigrasi itu sendiri. Lokasi para Anggota Keimigrasian itu sendiri antara lain: Bandara Udara Internasional, Pelabuhan Laut Internasional dan Perbatasan Negara guna menjaga, mengawasi, dan memperhatikan datangnya dan perginya suatu orang maupun barang yang datang dan pergi dari negara satu maupun ke negara lainnya.[[2]](#footnote-3)

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin migratio yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain (M.Iman Santoso, 2004). Ada istilah emigratio yang memiliki arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah immigratio dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.[[3]](#footnote-4)

Migrasi atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak zaman dahulu, manusia sudah sering berpindah dari kampung halamannya ke daerah lain. Namun, di era globalisasi sekarang ini, fenomena migrasi menemukan bentuk yang berbeda, baik dari segi motif, skala, jarak maupun akibat yang ditimbulkannya. Tidak seperti di masa lalu dimana migrasi kebanyakan terjadi di dalam satu wilayah negara, migrasi sekarang ini sudah melintasi batas teritorial negara, bahkan benua. Globalisasi meniscayakan adanya hubungan yang sangat integral antara satu masyarakat dengan yang lain yang diakibatkan oleh semakin kaburnya hambatan-hambatan jarak dan informasi.[[4]](#footnote-5)

Migran ekonomi adalah orang yang meninggalkan negara asalnya dan menetap di negara lain dengan motif utama untuk meningkatkan kesejahteraan. Istilah *economic migrant* digunakan untuk membedakan migran pada kategori ini dengan orang yang meninggalkan negara asalnya karena motif politik atau untuk menghindari ancaman. *Economic migrant* juga sering digunakan untuk menyebut orang yang mencoba masuk ke suatu negara tanpa izin dengan alasan mencari suaka namun tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.[[5]](#footnote-6)

Migrasi tenaga kerja adalah pergerakan manusia dari negara asal ke negara lain dengan motivasi utama untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Jumlah tenaga kerja yang melakukan migrasi antarnegara dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya negara dan kawasan yang memberlakukan aturan perdagangan bebas barang dan jasa. Selain merupakan bagian dari fenomena globalisasi, migrasi tenaga kerja juga dapat dilihat sebagai dampak dari tingginya kesenjangan ekonomi antara kelompok negara kaya dan kelompok negara miskin.[[6]](#footnote-7)

Imigrasi dalam jumlah besar dan berkelanjutan akan merubah komposisi demografis negara penerima. Imigran yang awalnya datang sebagai pekerja atau pengungsi tidak mau kembali ke negara asalnya. Mereka lebih memilih tetap tinggal di *host country* selepas kontrak kerja mereka selesai. Mereka yang tinggal dalam waktu lama, akan mendapatkan kewarganegaraan. Pada masa selanjutnya, warga negara keturunan asing ini akan membentuk minoritas dengan jumlah signifikan yang rentan diskriminasi, terlebih jika mereka memiliki latar belakang politik dan budaya dengan negara tempat tinggal.[[7]](#footnote-8)

Emigrasi adalah tindakan seseorang meninggalkan satu negara untuk menetap di negara lain. Norma internasional di bidang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk meninggalkan negara mana pun termasuk negara asal mereka. Pembatasan pada hak individu untuk meninggalkan wilayahnya hanya dapat diterapkan pada situasi tertentu.[[8]](#footnote-9)

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka, dalam melakukan perlintasan antarnegara, digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. Paspor adalah izin untuk melewati pelabuhan atau pintu masuk, paspor berasal dari kata to pass yaitu melewati, dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun kepada pemegang berada. Selain itu di dalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlalu secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Kemudian di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa berasal dari kata latin visum yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian, istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri, untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara. Dalam pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara dan setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya sendiri. Namun tidak semua imigran masuk ke negara lain melalui prosedur keimigrasian, ada juga beberapa imigran dengan alasan tertentu masuk ke negara lain tidak melalui proses keimigrasian, mereka ini disebut imigran gelap (ilegal).

1. **Imigran Gelap**

Imigran gelap saat ini merupakan masalah bagi negara-negara penerima imigran atau negara tujuan imigran. Pengertian Imigran gelap adalah migrasi yang terjadi diluar prosedur dan aturan negara yang ada atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku. Ada 4 situasi orang disebut imigran gelap: (a) Imigran yang masuk secara sembunyi-sembunyi, dengan dokumen palsu; (b) Menetap lebih dari waktu yang diizinkan; (c) Korban jaringan perdagangan manusia; (d) sengaja melecehkan sistem suaka internasional.[[9]](#footnote-10)

1. **Faktor Penyebab Imigrasi**

Terjadinya imigrasi tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa alasan mengapa orang sampai melakukan imigrasi. Berikut beberapa faktor pendorong terjadinya imigrasi yaitu: (a) keinginan untuk meningkatkan taraf hidup; (b) upaya menghindari tekanan, ancaman, atau tindak kekerasan di negara asal; (c) reunifikasi keluarga.[[10]](#footnote-11)

Migrasi antarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor nonekonomi seperti misalnya bencana alam, agama, ras dan politik. Untuk faktor ekonomi biasanya imigrasi didasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya. Harapan untuk memperoleh pendapat yang lebih tinggi atau standar hidup yang lebih baik merupakan tujuan pindah ke tempat/negara lain. Kebijaksanaan imigrasi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Satu negara yang sudah terlalu banyak penduduknya tidak akan banyak mendorong imigrasi. Sebaliknya negara yang kurang penduduknya mendorong imigrasi secara selektif, terutama untuk tenaga kerja yang berkualitas.[[11]](#footnote-12)

1. **Hukum/Konvensi Internasional Berkaitan dengan Imigran**

Masalah imigran saat ini bukan lagi masalah satu negara saja, sudah banyak negara-negara di dunia yang menganggap masalah imigran ini merupakan masalah yang serius, beberapa bukti keseriusan negara-negara di dunia dalam menyikapi imigran terbukti dengan lahirnya hukum internasional yang mengatur maupun yang berkaitan dengan imigran.

Berikut beberapa Hukum/Konvensi Internasional yang berkaitan dengan imigran:

1. Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB 1948.

2. Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik.

3. Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

4. Konvensi Menentang Penyiksaan.

5. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak.

6. Konvensi Tentang Pekerja Migran.[[12]](#footnote-13)

1. **Masuknya Imigran ke Perancis**
2. **Pengetahuan Umum Tentang Perancis**

Republik Perancis atau Perancis adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Orang Perancis sering menyebut Perancis Metropolitan sebagai "L'Hexagone" ("Heksagon") karena bentuk geometris teritorinya. Perancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial yang tidak punya presiden. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.

Perancis berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra dan Spanyol. Karena memiliki departemen seberang laut, Perancis juga berbagi perbatasan tanah dengan Brasil dan Suriname dan Sint Maarten. Perancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh Terowongan Channel yang berada di bawah Selat Inggris. Perancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Pada abad ke-18 dan 19, Perancis membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara, mempengaruhi budaya dan politik daerah tersebut.

Perancis adalah negara maju, dengan ekonomi terbesar keenam (PDB nominal) atau kedelapan (PPP) terbesar di dunia. Merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menerima 82 juta turis asing per tahun (termasuk pelancong bisnis, tapi tidak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Perancis). Perancis adalah salah satu negara pendiri Uni Eropa dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Perancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota Francophonie, G8, NATO, dan Uni Latin. Merupakan salah satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga kekuatan nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit listrik tenaga nuklir.

Nama "France" berasal dari Francia Latin, yang berarti "tanah bangsa Frank" atau "Frankland". Terdapat berbagai teori asal nama Frank. Salah satunya berasal dari kata Proto Jermanik frankon yang diartikan sebagai javelin atau lance karena kapak lempar Frank yang dikenal sebagai francisca. Etimologi lainnya adalah bahwa dalam sebuah bahasa Jermanik kuno, Frank berarti "bebas" yang merujuk pada budak. Kata ini masih digunakan dalam bahasa Perancis sebagai franc, juga digunakan sebagai penerjemahan "Frank" dan nama mata uang lokal, hingga penggunaan euro pada tahun 2000-an. Dalam bahasa Jerman, Perancis masih disebut Frankreich, yang berarti "Kerajaan Bangsa Frank". Untuk membedakannya dari Kekaisaran Frank Charlemagne, Perancis Modern disebut Frankreich, sementara Kerajaan Frank disebut Frankenreich.

Kerajaan memerintah Perancis hingga Revolusi Perancis, tahun 1789, Louis XVI dan istrinya, Marie Antoinette, dieksekusi (tahun 1793), bersama ribuan warga sipil Perancis lainnya. Setelah berbagai skema pemerintahan pendek, Napoleon Bonaparte mengambil alih pemerintahan Republik tahun 1799, menjadikannya Konsul Pertama, dan kemudian Kaisar yang sekarang dikenal sebagai Kekaisaran Pertama (1804–1814). Dalam beberapa perang, pasukannya menguasai sebagian besar benua Eropa, dengan anggota keluarga Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari kerajaan-kerajaan yang baru didirikan. Setelah kekalahan terakhir Napoleon tahun 1815 dalam Pertempuran Waterloo, monarki Perancis dibentuk kembali, tapi dengan pembatasan konstitusional baru. Tahun 1830, sebuah pemberontakan warga sipil memaksa pembentukan Monarki Juli konstitusional, yang berjalan hingga 1848. Republik Kedua yang berusia pendek ini berakhir tahun 1852 ketika Louis-Napoléon Bonaparte memproklamirkan Kekaisaran Kedua. Louis-Napoléon mundur setelah kekalahan dalam perang Perancis-Prusia tahun 1870 dan rezimnya digantikan oleh Republik Ketiga.

Perancis memiliki jajahan kolonial, dalam berbagai bentuk, sejak awal abad ke-17 hingga 1960-an. Pada abad ke-19 dan 20, imperium kolonial seberang laut globalnya terbesar kedua di dunia setelah Imperium Britania. Pada puncaknya, antara 1919 dan 1939, imperium kolonial Perancis kedua membentang hingga 12.347.000 kilometer persegi (4.767.000 sq mi). Termasuk Perancis Metropolitan, total wilayah daratan dibawah kedaulatan Perancis mencapai 12.898.000 kilometer persegi (4.980.000 sq mi) tahun 1920-an dan 1930-an, yang mencakup 8.6% dari total daratan dunia. Meskipun menang dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Perancis mengalami banyak kematian dan kerugian material (dan meskipun hanya sebagian kecil teritorinya diduduki selama Perang Dunia I, teritori metropolitannya diduduki seluruhnya oleh Jerman selama Perang Dunia II).

Tahun 1930-an ditandai oleh berbagai reformasi sosial yang diperkenalkan oleh pemerintah Front Populer. Republik Keempat dibentuk setelah Perang Dunia II dan selain pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, negara ini berusaha mengelola status politiknya sebagai negara bangsa dominan. Perancis berusaha menjaga imperium kolonialnya, tapi kemudian menjadi masalah. Usaha 1936 untuk mengambil kembali kontrol atas Indochina Perancis mengakibatkan tercetusnya Perang Indochina Pertama, yang berakhir dalam kekalahan Perancis di Pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954. Beberapa bulan kemudian, Perancis menghadapi konflik baru dan lebih besar di Aljazair.

Debat mengenai mungkin atau tidak menjaga kontrol terhadap Aljazair, yang kemudian rumah bagi satu juta penetap Eropa, menghancurkan negara dan hanpir memulai perang sipil. Tahun 1958, Republik Keempat yang lemah dan tidak stabil berubah menjadi Republik Kelima, yang memiliki kekuasaan Presiden lebih diperkuat. pemimpin pertamanya, Charles de Gaulle berusaha mempersatukan negara sementara mengakhiri perang. Perang Aljazair dan perang sipil Perancis-Perancis yang berlangsung di ibukota Aljir, berakhir dengan negosiasi damai tahun 1962 yang membawa kemerdekaan Aljazair. Dalam beberapa dekade terakhir, rekonsiliasi dan kerjasama Perancis dengan Jerman telah membuktikan sentral ke politik dan integrasi ekonomi Uni Eropa, termasuk perkenalan euro bulan Januari 1999. Perancis telah menempati garis depan negara anggota Uni Eropa yang mencoba memanfaatkan kesempatan persatuan keuangan untuk membentuk sebuah badan politik, pertahanan, dan keamanan Uni Eropa yang lebih bersatu.

1. **Pemerintahan**

Pemerintahan Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan Kepala Negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama 5 tahun (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk presiden.

Parlemen Perancis adalah sebuah badan legislatif yang terdiri dari Majelis Nasional (Assemblée Nationale) dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan terpilih langsung selama 5 tahun. Majelis memiliki kekuasaan untuk membubarkan kabinet, dan mayoritas anggota Majelis menetapkan pilihan pemerintah. Senator dipilih oleh dewan pemilih untuk jabatan 6 tahun (sebenarnya 9 tahun), dan setengah kursi dimasukkan dalam pemilihan setiap 3 tahun yang dimulai pada September 2008. Kekuasaan legislatif terbatas; dalam penentangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan terakhir, kecuali untuk hukum konstitusional dan lois organiques (hukum yang disediakan langsung oleh konstitusi) dalam beberapa hal. Pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan agenda Parlemen. Politik Perancis ditandai oleh dua pengelompokkan yang saling menentang secara politik: pertama sayap kiri, dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Perancis, dan lainnya sayap kanan, sebelumnya dipusatkan pada Rassemblement pour la République (RPR) dan sekarang Persatuan untuk Gerakan Rakyat (UMP). Cabang eksekutif kebanyakan terdiri dari anggota UMP.

Perancis adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjabat sebagai salah satu anggota permanen Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Juga anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Sekretariat Komunitas Pasifik(SPC) dan Komisi Samudera Hindia (COI). Negara ini adalah anggota terkait Asosiasi Negara Karibia (ACS) dan anggota utama Organisasi Francophone Internasional (OIF) dari lima puluh satu negara penutur bahasa Perancis. Memiliki kantor pusat OECD, UNESCO, Interpol, Alliancea Base dan International Bureau for Weights and Measures. Tahun 1953 Perancis menerima permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat lambang yang dapat mewakilinya secara internasional. Kemudian lambang Perancis digunakan dan dipakai pada paspor. Kebijakan luar negeri Perancis telah dibentuk oleh keanggotaan Uni Eropa, yang merupakan anggota pendiri. Tahun 1960-an, Perancis berusaha mengeluarkan Britania Raya dari organisasi itu, karena hanya diperuntukkan benua Eropa. Sejak 1990-an, Perancis telah membuat hubungan dekat dengan Jerman bersatu untuk menjadi penggerak paling berpengaruh di UE, tapi menyaingi Britania dan membatasi pengaruh negara-negara Eropa Timur. Perancis adalah anggota North Atlantic Treaty Organisation, tapi dibawah Presiden de Gaulle, Perancis mengeluarkan diri dari komando militer bersama untuk menghindari dominasi kebijakan luar negeri dan keamanannya oleh pengaruh politik dan militer AS. Pada awal 1990-an, negara ini menerima banyak kritik dari negera lain untuk uji coba nuklir bawah tanahnya di Polinesia Perancis.

1. **Hukum**

Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal terutama dari peraturan tertulis; hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara hukum seharusnya hanya melarang aksi yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara: Kebebasan adalah peraturan, dan larangannya adalan pengecualian; larangan kebebasan apapun harus dibuat oleh Hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan.

Berarti, hukum harus mengeluarkan larangan hanya apabila dibutuhkan, dan bila ketidaknyamanan disebabkan oleh larangan ini tidak melebihi ketidaknyamanan yang diwajibkan larangan untuk pemulihan. Dalam praktik, tentunya, ideologi ini sering gagal ketika hukum dibuat. Hukum Perancis terbagi menjadi dua bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi, biasanya, hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi dalam praktik, hukum Perancis terdiri dari tiga bagian utama: hukum sipil, hukum kriminal dan hukum administratif. Perancis tidak mengakui hukum agama, ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Sebagai konsekuensi, Perancis tidak lagi memiliki hukum pengumpatan atau hukum sodomi (terakhir dihapus tahun 1791). Tetapi "serangan terhadap kesusilaan umum" (contraires aux bonnes mœurs) atau perusak perdamaian (trouble à l'ordre public) telah digunakan untuk menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan. Hukum hanya dapat digunakan pada masa depan dan bukan masa lalu (hukum ex post facto dilarang); dan harus dilaksanakan, hukum harus secara resmi diterbitkan dalam Journal Officiel de la République Française.

1. **Militer**

Angkatan bersenjata Perancis terbagi menjadi empat cabang: Armée de Terre (Darat), Marine Nationale (Laut), Armée de l'Air (Udara), Gendarmerie Nationale (sebuah pasukan militer yang berperan sebagai Polisi Pedesaan Nasional dan sebagai polisi militer untuk seluruh militer Perancis). Sejak Perang Aljazair, konskripsi telah dikurangi dan dihapus tahun 2001 oleh Jacques Chirac. Jumlah seluruh personel militer adalah 359.000 orang. Perancis menghabiskan 2.6% PDB-nya pada pertahanan, sedikit lebih banyak dari Britania Raya (2.4%), dan merupakan yang tertinggi di Uni Eropa di mana pengeluaran pertahanan umumnya kurang dari 1.5% PDB. Bersama-sama merupakan 40% dari pengeluaran pertahanan UE. Sekitar 10% pendapatan pertahanan Perancis masuk ke force de frappe, atau senjata nuklir. Sebagian peralatan militer Perancis dibuat di Perancis. Contohnya pesawat tempur Rafale, kapal angkut pesawat Charles de Gaulle, misil Exocet dan misil Leclerc.

Beberapa senjata, seperti E-2 Hawkeye atau E-3 Sentry dibeli dari Amerika Serikat. Daripada keluar dari proyek Eurofighter, Perancis aktif berinvestasi dalam proyek bersama Eropa seperti Eurocopter Tiger, Kapal perang kecil serbaguna, demonstrator UCAV nEUROn dan Airbus A400M. Perancis adalah penjual senjata besar karena kebanyakan desain arsenalnya tersedia untuk pasar ekspor dengan pengecualian peralatan bertenaga nuklir. Beberapa peralatan buatan Perancis dirancang khusus untuk ekspor seperti kapal selam kelas Scorpène Perancis-Spanyol. Beberapa peralatan Perancis telah dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan negara sekutu seperti kapal selam kelas berat (berdasarkan kelas La Fayette) atau kapal selam kelas Hashmat (berdasarkan kapal selam kelas Agosta).

Meskipun memiliki satuan anti-teroris paling kuat seperti GIGN atau EPIGN gendarmerie adalah pasukan polisi militer yang berperan sebagai pasukan polisi pedesaan dan umum. Sejak pembentukannya GIGN telah menjalani seribu operasi dan membebaskan lima ratus sandera; pembajakan Air France Penerbangan 8969 menarik perhatian dunia. Intelijen Perancis dapat dibagi menjadi dua satuan utama: DGSE (badan luar) dan DST (badan domestik). Yang terakhir adalah bagian polisi sementara yang pertama dikaitkan dengan angkatan darat. DGSE terkenal untuk Penenggelaman Rainbow Warrior, tapi juga dikenal karena mengungkap banyak jaringan mata-mata berteknologi tinggi terkini yang belum diketahui di Eropa dan Amerika Serikat melalui agen Vladimir Vetrov. "Force de frappe" Perancis bersandar pada kebebasan penuh. Arsenal nuklir Perancis terdiri dari empat kapal selam yang dilengkapi dengan misil balistik M45. Triomphant sedang- sedang dibuat untuk menggantikan bekas kelas Redoutable. M51 akan menggantikan M45 pada masa depan dan memperpanjang jangkauan tembak Triomphant. Disamping kapal selam pasukan penjaga Perancis menggunakan Mirage 2000N; varian dari Mirage 2000 dan dirancang untuk mengirim serangan nuklir. Peralatan nuklir lainnya seperti misil balistik antarbenua Plateau d'Albion dan misil jarak pendek Hadès telah dimatikan. Dengan 350 hulu ledak nuklir Perancis adalah kekuatan nuklir terbesar ketiga di dunia.

1. **Ekonomi**

Ekonomi Perancis menggabungkan perusahaan pribadi ekstensif (hampir 2.5 perusahaan terdaftar) dengan intervensi pemerintah substansial (meskipun menurun). Pemerintah mempertahankan pengaruh terhadap bagian penting dalam sektor infrastruktur, dengan kepemilikan mayoritas atas firma rel kereta api, listrik, pesawat terbang, dan telekomunikasi. Telah mengendurkan kontrolnya secara bertahap sejak awal 1990-an. Pemerintah perlahan-lahan menjual saham di France Télécom, Air France, juga industri asuransi, perbankan, dan pertahanan.

Sebuah anggota grup negara industri maju G8, Perancis menempati peringkat ekonomi terbesar kelima atau keenam menurut PDB nominal yang bergantung pada sumbernya. Perancis bergabung dengan 11 anggota UE lainnya untuk meluncurkan euro pada tanggal 1 Januari 1999, dengan koin dan uang kertas euroyang menggantikan franc Perancis (₣) pada awal 2002. Menurut OECD, tahun 2004 Perancis adalah pengekspor barang manufaktur terbesar kelima di dunia dan pengimpor terbesar keempat di dunia. Tahun 2003, Perancis adalah penerima investasi langsung asing terbesar ke-2 di antara negara OECD dengan nilai $47 miliar, setelah Luksemburg (di mana investasi langsung asing adalah transfer uang ke bank yang terletak di negara itu) tapi di atas Amerika Serikat ($39.9 miliar), Britania Raya ($14.6 miliar), Jerman ($12.9 miliar), atau Jepang ($6.3 miliar). Pada tahun yang sama, perusahaan Perancis menginvestasikan $57.3 miliar di luar Perancis, menempatkan Perancis sebagai investor langsung luar terpenting kedua di OECD, setelah Amerika Serikat ($173.8 miliar), dan di atas Britania Raya ($55.3 miliar), Jepang ($28.8 miliar) dan Jerman ($2.6 miliar). Dalam edisi 2005 OECD in Figures, OECD juga mencatat bahwa Perancis memimpin negara G7 menurut produktivitas (diukur sebagaimana PDB per jam bekerja). Tahun 2004, PDB per jam yang bekerja di Perancis adalah $47.7, di atas Amerika Serikat ($46.3), Jerman ($42.1), Britania Raya ($39.6), atau Jepang ($32.5).

Dengan 81.9 juta turis asing tahun 2007, Perancis menempati peringkat pertama sebagai tujuan turis terbaik di dunia, di atas Spanyol (58.5 juta tahun 2006) dan Amerika Serikat (51.1 juta tahun 2006). Jumlah 81.9 juta ini tidak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Perancis, seperti orang Eropa Utara yang melintasi Perancis dalam perjalanan ke Spanyol atau Italia selama musim panas. Perancis memiliki kota berbudaya tinggi (Paris menjadi yang utama), pantai dan resor tepi laut, resor ski, dan wilayah pedesaan yang dinikmati untuk keindahan dan kenyamanannya (pariwisata hijau). Disamping pariwisata biasa Perancis menarik berbagai peziarah religius ke Lourdes, sebuah kota di département Hautes-Pyrénées, yang dikunjungi beberapa juta turis per tahun. Situs pariwisata terkenal meliputi: (menurut peringkat pengunjung per tahun pada tahun 2003): Menara Eiffel (6.2 juta), Museum Louvre (5.7 juta), Istana Versailles (2.8 juta), Musée d'Orsay (2.1 juta), Arc de Triomphe (1.2 juta), Centre Pompidou (1.2 juta), Mont-Saint-Michel (1 juta), Château de Chambord (711.000),Sainte-Chapelle (683.000), Chateau du Haut-Koenigsbourg (549.000), Puy de Dome (500.000), Musee Picasso (441.000), Carcassonne (362.000).

Perancis memiliki industri angkasa penting yang dipimpin oleh konsorsium Eropa Airbus, dan bersama Swedia menjadi satu-satunya kekuatan Eropa (tak termasuk Rusia) yang memiliki pelabuhan antariksa nasional pribadi (Centre Spatial Guyanais). Perancis juga negara Barat yang paling independen energinya karena investasi besar dalam tenaga nuklir (tenaga nuklir di Perancis), yang juga membuat Perancis produsen paling sedikit karbondioksida di antara tujuh negara industri di dunia. Sebagai hasil investasi besar dalam teknologi nuklir, banyak listrik yang diproduksi di negara itu dibangkitkan oleh pembangkit tenaga nuklir (78.1% pada 2006, meningkat dari 8% tahun 1973, 24% tahun 1980, dan 75% tahun 1990).

Tanah subur yang banyak, pembuatan teknologi modern, dan subsidi UE telah bergabung untuk menjadikan Perancis produsen dan pengekspor hasil pertanian terdepan di Eropa. Gandum, unggas, susu, daging dan juga industri pangan dan anggur yang diakui adalah ekspor pertanian utama Perancis. Subsidi agrikultur UE ke Perancis hampir mencapai $14 miliar. Sejak akhir Perang Dunia Kedua pemerintah melakukan usaha untuk berintegrasi dengan Jerman, secara ekonomi dan politik.

1. **Demografi**

Dengan sekitar 64,5 juta jiwa, Perancis adalah negara terpadat ke-19 di dunia. Kota terbesar di Perancis adalah Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Strasbourg, Nantes dan Rennes. Tahun 2003, pertumbuhan penduduk alami Perancis (tak termasuk imigrasi) menyumbang hampir seluruh pertumbuhan penduduk alami di Uni Eropa. Tahun 2004, pertumbuhan penduduknya adalah 0.68% dan kemudian tahun 2005 jumlah kelahiran dan fertilitas terus meningkat. Peningkatan kelahiran alami atas kematian meningkat hingga 299.800 tahun 2006. Jumlah fertilitas seumur hidup meningkat hingga 2.00 tahun 2007, dari 1.92 tahun 2004. Tahun 2004, 140.033 orang bermigrasi ke Perancis. Di antaranya, 90.250 berasal dari Afrika dan 13.710 dari Eropa. Tahun 2005, tingkat imigrasi jatuh sedikit hingga 135.890.

Perancis adalah sebuah negara dengan berbagai macam etnis. Menurut Institut Nasional Perancis untuk Statistik dan Pembelajaran Ekonomi, negara ini memiliki 4.9 imigran yang lahir di luar negeri, 2 juta di antaranya telah memperoleh kewarganegaraan Perancis. Perancis adalah negara tujuan perlindungan utama di Eropa Barat dengan sekitar 50.000 orang tahun 2005 (penurunan 15% dari tahun 2004). Uni Eropa membolehkan pergerakan bebas antara negara anggota. Sementara Britania Raya (bersama Irlandia) tidak memberlakukan larangan itu, Perancis melakukan aturan untuk membendung migrasi Eropa Timur.

1. **Agama**

Perancis adalah sebuah negara sekuler karena kebebasan beragama adalah hak konstitusional, meskipun beberapa organisasi religius seperti Scientology, Children of God, Unification Church, dan Order of the Solar Temple dianggap sebagai pemujaan. Menurut jajak pendapat Januari 2007 oleh Catholic World News: 51% orang Perancis beragama Katolik, 31% agnostik atau ateis. (Jajak pendapat lainnya memberikan ateis persentase 27%), 10% dari agama lain atau tanpa pendapat, 4% Muslim, 3% Protestan, 1% Yahudi.

Menurut Eurobarometer Poll terbaru 2005, 34% warga Perancis merespon bahwa "mereka mempercayai adanya Tuhan", sementara 27% menjawab "mereka percaya terdapat suatu jenis ruh atau kekuatan hidup" dan 33% menyatakan "mereka tidak percaya adanya suatu jenis ruh, Tuhan, atau kekuatan hidup". Satu survei lain menyatakan 32% penduduk di Perancis ateis, dan 32% lainnya "meragukan adanya Tuhan tapi bukan ateis". Jumlah komunitas Yahudi di Perancis mencapai 600.000 menurut World Jewish Congress dan merupakan yang terbesar di Eropa. Perkiraan jumlah Muslim di Perancis selalu bermacam. Menurut sensus Perancis 1999, terdapat 3.7 juta orang dengan "kemungkinan kepercayaan Muslim" di Perancis (6.3% dari total populasi). Tahun 2003, Kementerian Dalam Negeri Perancis memperkirakan jumlah Muslim mencapai 5-6 juta.

Konsep laïcité ada di Perancis dan karena ini, sejak 1905, pemerintah Perancis secara legal menolak pengakuan agama apapun (kecuali peraturan seperti ulama militer dan Alsace-Moselle). Sementara itu, Perancis mengakui organisasi religius, sesuai kriteria hukum formal yang tidak menggunakan doktrin keagamaan. Sebaliknya, organisasi religius harus mengulang dari intervensi dalam pembuatan kebijakan. Ketegangan sering terjadi mengenai diskriminasi tuduhan terhadap kaum minoritas, khususnya terhadap Muslim.

1. **Olahraga**

Olahraga terkenal di Perancis meliputi sepak bola, cikal bakal dari rugby dan di beberapa wilayah, basket dan bola tangan. Perancis telah menyelenggarakan pertandingan seperti Piala Dunia FIFA 1930 dan 1998, dan Piala Dunia Persatuan Rugby 2007. Stade de France di Paris adalah stadion terbesar di Perancis dan tempat diadakannya final Piala Dunia FIFA 1998, dan menyelenggarakan final Piala Dunia Rugby 2007 pada Oktober 2007. Perancis juga mengadakan Tour de Francetahunan, balap sepeda jalan paling terkenal di dunia. Perancis juga terkenal karena balap pertahanan mobil sport 24 Jam Le Mans yang diadakan di departemen Sarthe. Perancis memiliki hubungan dekat dengan Olimpiade Modern; adalah aristokrat Perancis, Baron Pierre de Coubertin, yang menyarankan kebangkitan Olimpiade, di akhir abad ke-19. Setelah Athena mengadakan Olimpiade pertama, sesuai asal Olimpiade di Yunani, Paris mengadakan Olimpiade kedua tahun 1900. Paris juga merupakan tempat kantor pusat Komite Olimpiade Internasional pertama, sebelum dipindahkan ke Lausanne. Sejak Olimpiade 1900, Perancis telah menyelenggarakan Olimpiade sebanyak empat kali: Olimpiade Musim Panas 1924, di Paris dan tiga Olimpiade Musim Dingin (1924 di Chamonix, 1968 di Grenoble dan 1992 di Albertville).

Tim sepak bola nasional dan tim persatuan rugby nasional diberi nama "Les Bleus" karena warna kaus tim juga bendera tiga warna Perancis. Tim sepak bolanya dianggap sebagai yang terbaik di dunia dengan satu kemenangan Piala Dunia FIFA tahun 1998, satu peringkat kedua Piala Dunia FIFA tahun 2006, dan dua European Championship dalam 1984 dan 2000. Kompetisi klub sepak bola nasional teratas adalah Ligue 1. Rugby juga sangat populer, di Paris dan barat daya Perancis. Tim rugby nasional telah bertanding setiap Piala Dunia Rugby, dan ikut dalam Kejuaraan Enam Negara tahunan. Setelah turnamen domestik tim rugby Perancis telah memenangkan enam belas Kejuaraan Enam Negara, termasuk delapan grand slam; dan mencapai semi-final dan final Piala Dunia Rugby.[[13]](#footnote-14)

1. **Imigran di Perancis**

Perancis adalah sebuah wilayah yang dibangun oleh beragam kebudayaan. Bangsa Galia yang merupakan nenek moyang bangsa Perancis telah bersentuhan dengan berbagai bangsa lain dengan berbagai kebudayaannya : bangsa Germanik, Seltik, Romawi, Wisigoth, Vandale, Alain, Burgonde, Hun, Franc, Hongaria, Sarrasin, dan Normand. Para bangsawan, teolog, pedagang, penulis, penyair, filsuf, serta seniman dengan latar belakang budaya yang berbeda turut memperkaya budaya Perancis. Para pendatang juga menjadi bantuan yang amat berharga tatkala Perancis kekurangan tenaga kerja setelah Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia.

Untuk mendefinisikan para pendatang, bahasa Perancis mengenal dua istilah, yaitu “étranger” dan “immigré”. Kata “étranger” berarti “une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu’elle possède une autre nationalité soit qu’elle n’ait aucune” (orang asing yang tinggal di Perancis dan tidak memiliki kewarganegaraan Perancis, baik karena memiliki kewarganegaraan asing maupun tidak memiliki kewarganegaraan apa pun). Sementara menurut Haut Conseil à l’intégration, immigré atau imigran adalah “une personne née étrangère à l’étranger et entrée en France en cette qualité en vue de s’établir sur le territoire français de façon durable” (seorang asing yang lahir di luar Perancis dan masuk ke Perancis dalam keadaan tersebut untuk tinggal di wilayah Perancis).

Para imigran datang dan menetap di Perancis untuk beberapa alasan, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mengikuti keluarga yang telah terlebih dahulu tinggal di Perancis, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan perlindungan politik, dan lain sebagainya. Menurut data l’INSEE tahun 2007, jumlah imigran di Perancis mencapai 8,3% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 63.713.926 orang atau sebannyak 5.253.000 orang. Data tahun 2008 menunjukkan bahwa 3,1 juta warga Perancis yang berusia antara 18-50 tahun adalah keturunan imigran. Dan 50% di antaranya memiliki ayah dan ibu imigran, sementara 20% lainnya memiliki ibu imigran dan 30% meniliki ayah imigran.

Empat dari sepuluh imigran berasal dari keturunan Afrika, terutama negara-negara Maghreb, seperti Aljazair, Maroko, Tunia. Selain itu jumlah imigran yang berasal dari Asia, seperti negara-negara Indochina dan China, juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini memperlihatkan suatu perubahan pada konfigurasi negara asal para imigran, karena pada mulanya kebanyakan imigran di Perancis berasal dari Eropa, terutama daerah Mediterania, Itali, dan Spanyol. Di sisi lain, studi demografi juga menunjukkan bahwa jika sebelum 1970, populasi pendatang lebih didominasi oleh laki-laki, orang dewasa, dan pekerja, maka fenomena baru justru memperlihatkan adanya kenaikan jumlah pendatang baru dari kalangan perempuan dan anak-anak.

1. **Sejarah Singkat Imigrasi di Perancis**

Perancis sebagai salah satu negara tujuan imigrasi memiliki sejarah yang amat panjang mengenai kaum pendatang yang tiba di Perancis dalam beberapa gelombang imigrasi yang berbeda. Sejarah imigrasi modern di negara ini telah dimulai pada abad ke-5 dan masih berlanjut hingga hari ini.

Beberapa hal penting dalam sejarah imigrasi di Perancis pada abad ke-20, antara lain :

1. Akibat perang, Perancis seperti juga negara-negara lainnya di Eropa porak poranda. Untuk itu pembangunan kembali menjadi suatu keharusan. Namun perang telah memakan korban jiwa yang amat besar, sehingga Perancis terpaksa kehilangan begitu banyak tenaga kerja. Di sisi lain, selama masa Les Trente Glorieuses (1945-1975), ekonomi mengalami kemajuan yang amat pesat. Namun kemajuan ekonomi tidak diiringi dengan kenaikan penduduk yang tinggi. Bahkan pada masa Baby Booming, pertumbuhan penduduk di Perancis hanya mencapai 1%.

Untuk memecahkan permasalahan anemia demografi ini, Office National d’Immigration (ONI) menerbitkan Ordonansi 2 November 1945 untuk 2 tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, dan, untuk jangka panjang, memperbaiki populasi negara. Sementara para pembuat kebijakan publik memperbaiki dan mengatur imigrasi di Perancis sebagai bagian dari program mendatangkan para pekerja imigran untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja.

Pada masa ini diterbitkan beberapa perundang-undangan yang dianggap pro pekerja imigran, misalnya regroupement famillial, yaitu suatu prosedur yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara Perancis yang secara teratur tinggal di Perancis, setelah memenuhi beberapa ketentuan, untuk mengajak anggota keluarga (istri/suami, dan anak-anak) dan hidup sebagai kelurga di Perancis. Proyek ini kemudian mendatangkan ratusan ribu pendatang baru ke Perancis. Sebelum 1974, sepertiga dari jumlah imigran yang datang ke Perancis adalah mereka ayang berpartisipasi dalam program regroupement famillial ini.

2. Keadaan di atas berubah ketika terjadi krisis ekonomi pada 1974. Pemerintah kemudian membatasi imigrasi dengan mengurangi program regroupement famillial dan permohonan kerja. Dan sejak 1977 dimulailah program yang dinamai le million Stoléru, sebagai upaya untuk mendorong para imigran agar pulang ke negara asal mereka secara sukarela, dan sebagai imbalan mereka akan menerima kompensasi sebesar 10.000 francs. Setahun kemudian, program ini diubah menjadi pemulangan paksa bagi 500.000 pekerja imigran.

3. Undang-undang Bonnet yang diterbitkan pada 1980 semakin mempersulit kedatangan para imigran ke wilayah Perancis. Para pendatang ilegal atau mereka yang tidak memperbaharui surat ijin tinggal diusir dengan alasan mengganggu keamanan umum. Untuk itu pemerintah berhak menahan mereka selama 7 hari sebelum akhirnya memaksa mereka keluar dari wilayah Prancis.

Hal ini menimbulkan gelombang protes yang kemudian memaksa Christian Bonnet sebagai menteri dalam negeri untuk menunda pelaksanaan undang-undang tersebut. Sementara itu, gabungan organisasi pendukung pekerja imigran, Parti Socialiste, Parti Socialiste Unifié, Ligue Communiste Révolutionnaire, Confédération Française Démocratique du Travail, dan Ligue des Droits de l’Homme mengadakan pawai nasional di Paris sebagai aksi protes terhadap Undang-undang Stoléru yang mengatur kembali carte de séjour dan carte travail, sekaligus memrotes upaya pemerintah yang membatasi pelajar asing untuk mendaftar di universitas-universitas Perancis. Unjuk rasa besar-besaran berlangsung di Paris, Strasbourg, Bordeaux, dan Marseille. Lebih dari 60 asosiasi antirasis, organisasi keagamaan, dan organisasi keluarga turut terlibat dalam manifestasi yang berlangsung lebih dari 1 bulan ini.

4. Terpilihnya François Mitterand dari partai sayap kiri sebagai Presiden Perancis ke-21 (1981-1995) mengubah peta kebijakan mengenai imigrasi. Salah satunya adalah dengan memberlakukan larangan bagi semua bentuk pengusiran bagi para orang asing yang lahir di Perancis atau bagi mereka yang memasuki Perancis sebelum berumur 10 tahun. Sementara itu, Perdana Meteri Pierre Mauroy membuat persetujuan-persetujuan bilateral dengan negara-negara asal para pendatang untuk membatasi kedatangan imigran baru. Perjanjian antara Menteri Luar Negeri Claude Cheysson dan pemerintah Aljazair melahirkan kebijakan pemberian hak memilih bagi kaum imigran yang telah tinggal di Perancis dalam pemilihan di tingkat kota.

Beberapa undang-undang lainnya juga dibuat untuk mellindungi para imigran : larangan pengusiran bagi para imigran di bawah umur serta bagi anggota keluarga imigran, jaminan kebebasan berorganisasi bagi orang asing, pembagian sekitar 105.000 carte de séjour dan carte de travail yang berlaku selama 1 tahun bagi pendatang ilegal, reformasi Code de la nationalité yang mempermudah proses mendapatkan kewarganegaraan Perancis bagi mereka yang berusia 16-21 tahun dan lahir di Perancis dengan orang tua yang telah menetap di Perancis sekurangnya selama 5 tahun.

5. Unjuk rasa untuk la régularisation des sans-papiers diadakan di beberapa kota, termasuk Paris di mana lebih dari seratus orang pendatang ilegal menduduki kantor walikota untuk menyatakan tuntutan mereka (1996). Manifestasi ini mampu membuat pemerintahan Jacques Chirac (1995-2007) meregulasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan para pendatang, seperti penegakan le droit du sol melalui pemberian kewarganegaraan Perancis bagi anak-anak pendatang asing yang lahir di Perancis tanpa keharusan mengajukan permohonan sebelumnya serta penggantian certificats d’hébergement dengan une simple attestation d’accueil. Namun keputusan tersebut ditanggapi keras oleh organisasi-organisasi ekstrim kanan dengan mengatakan bahwa hal ini akan meningkatkan jumlah imigran gelap.

6. Deklarasi politik Perdana Meteri Dominique de Villepin (2005) mengenai pentingnya pemberlakuan immigration choisie dengan cara memperketat persyaratan regroupement famillial yang selama ini merupakan cara utama untuk berimigrasi ke Perancis, melakukan pengawasan ketat terhadap pernikahan campuran yang sering dijadikan kedok untuk memperoleh kewarganegaraan Perancis dan memperketat pemberian carte de séjour bagi pekerjaan melalui penerbitan kontrak kerja dan seleksi jenis pekerjaan yang dapat diberikan kepada para pendatang.

Kebijakan ini mendapat tantangan dari asosiasi pembela hak-hak manusia dan organisasi pendukung imigran dan pendatang gelap, terutama sisi represif politik imigrasi yang membentuk polisi imigrasi serta menerapkan kuota bagi pendatang asing.

1. **Integrasi dan Asimilasi**

Pemerintah Perancis, dengan menerbitkan undang-undang imigrasi yang sering berganti-ganti, tidak memberi kesempatan pada para imigran maupun keturunannya untuk benar-benar mengikuti proses integrasi di Perancis. Perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan anak-anak keturunan imigran dilakukan sangat sering, sehingga seringkali imigran dan keturunannya dirugikan karena ketidaktahuan mereka mengenai adanya undang-undang yang baru. Undang-undang terakhir mengenai kewarganegaraan menggunakan prinsip jus soli, yang memberikan kewarganegaraan kepada para keturunan imigran yang lahir di teritori Perancis saat mereka telah berumur 18 tahun dan telah bersekolah di sekolah Perancis sampai tingkat lycée (SMA), serta memanifestasikan keinginannya untuk menjadi warga negara Perancis kepada pihak yang berwenang.

Sebelumnya, Perancis pun pernah menerapkan prinsip jus sanguinis. Seringnya berganti-ganti prinsip tersebut membuat para imigran dan keturunannya lengah terhadap hak-haknya. Dan walaupun sekarang Perancis menerapkan prinsip jus soli, namun hal itu juga tidak otomatis berlaku, melainkan memiliki syarat yaitu memanifestasikan keinginan untuk menjadi warga negara Perancis. Tanpa manifestasi keinginan tersebut, anak-anak keturunan imigran tidak mendapatkan kewarganegaraan Perancis, walaupun telah lahir dan mengenyam pendidikan di sekolah Perancis.[[14]](#footnote-15)

Beberapa kelompok asal imigran masih mendapatkan stigma-stigma negatif, bahkan dimarjinalkan dengan ditempatkan di tempat-tempat khusus (ghetto urban) dan menimbulkan sejumlah besar masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, kenakalan remaja, kejahatan. Kehadiran kelompok-kelompok imigran acap diikuti dengan masalah integrasi. Di Perancis banyak pendatang yang tidak mampu berbahasa Perancis pada saat kedatangan mereka serta hanya bergaul dengan komunitas mereka saja. Di sisi lain penduduk setempat menunjukkan perasaan anti orang asing atau pandangan-pandangan rasis. Kehadiran pendatang sering dilihat sebagai sebuah invasi orang-orang yang tidak mampu berasimilasi.

Azouz Begag, komisaris untuk keberagaman, meyakinkan, seperti dikutip dalam www.clauderichman.com bahwa notre pays s’est construit grâce à sa diversité (negara kita dibangun dari keberagaman), sehingga menjadi suatu keharusan bagi semua warga Perancis untuk mengajarkan kepada generasi muda bahwa “Nos ancêtres n’étaient pas seulement les Gaulois” (Leluhur kita bukan hanya orang Galia).

Keberagaman demografis haruslah mengangkat keberagaman kebudayaan, mengingat Perancis selalu menjadi negara tujuan imigrasi. Untuk itu, politik nasional mengenai masalah imigrasi pengenalan budaya, selain pada masalah kedatangan dan tempat tinggal, pemberantasan buta huruf, serta pelatihan kerja. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan beberapa menteri terkait pada November 1975. Saling pengertian dalam keragaman budaya menuntut penguasaan bahasa Perancis sebagai bahasa nasional dan untuk integrasi yang lebih baik, pemerintah menekankan pendidikan untuk menguasai bahasa Perancis bagi lebih dari 1 juta anak imigran. Kebijakan ini merupakan salah satu dari 3 prioritas politik imigrasi Perancis selain peningkatan pemahaman dan praktik nilai-nilai republik serta peningkatan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Pembentukan Haut Conseil à l’intégration (1989) memiliki misi untuk memberikan nasihat dan usulan-usulan yang diperlukan kepada perdana menteri dan Comité interministériel à l’intégration mengenai masalah-masalah yang terkait dengan integrasi penduduk asing atau keturunan asing dan pembentukan Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations yang menyediakan layanan umum untuk penerimaan dan integrasi pendatang. Semua ini merupakan bagian dari upaya melawan diskriminasi melalui revitalisasi model integrasi di Perancis dan kesetaraan kesempatan bagi semua, karena kegagalan program integrasi diukur salah satunya melalui tingginya angka pengangguran di kalangan pendatang, selain melalui fenomena pemisahan tempat tinggal berdasarkan warna kulit serta kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi anak-anak imigran selama masa sekolah.

Hasil studi Communauté Européene mengatakan bahwa undang-undang antidiskriminasi di Perancis merupakan upaya nyata untuk mendukung proses integrasi. Upaya ini menampakkan hasil yang nyata setelah pembentukan Haute Autorité de Lutte contre Discrimination et pour l’Egalité (2004). penerapan undang-undang mengenai kesetaraan kesempatan melalui didirikannya Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mampu melaksanakan kebijakan Uni Eropa mengenai kesetaraan rasial (2006). Maka, para imigran dan keturunannya memiliki perlindungan yang lebih baik dari diskriminasi etnis dan rasial dalam bidang pendidikan, jaminan sosial, bantuan sosial serta memiliki akses terhadap kesehatan dan perumahan. Angket Eurobaromètre (2007) menunjukkan bahwa 80% orang Perancis menilai diksriminasi etnis masih terjadi di Perancis dan 61,2% di antaranya menilai perlunya meningkatkan upaya melawan semua bentuk diskriminasi di mana pun. Untuk itu sanksi yang tegas harus diberikan kepada aktor-aktor diskriminasi terhadap agama atau nasionalisme. Di sisi lain, negara dan institusi-institusi yang memberikan layanan publik haruslah mendukung kesetaraan dan melakukan tindakan yang lebih nyata.

1. **Masalah dan Peristiwa Imigran di Perancis**
2. **Imigran Gelap**

Imigran gelap adalah pendatang yang tinggal di Perancis tanpa memiliki ijin tinggal, baik karena masuk secara ilegal maupun karena tinggal tanpa memperpanjang ijin tinggal yang telah diperoleh sebelumnya. Tanpa carte de séjour, mereka tidak memiliki hak apa pun, bahkan tidak memiliki akses untuk memperoleh layanan publik minimal, seperti jaminan sosial dan jaminan kesehatan, sehingga mereka selalu berada dalam situasi yang paling rentan. Atas nama kepentingan umum, maka beberapa hak yang secara umum dianggap sebagai hak dasar, tidak diindahkan, seperti hak kebebasan berpindah tempat (droit à la libre circulation) yang dijamin dalam Déclaration universelle des droits de l’Homme dan hak mendapatkan suaka yang dijamin oleh Konvensi Jenewa sejak 1951 dan Protokol New York 1967.

Jumlah imigran gelap semakin meningkat seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan ijin tinggal di Perancis dan penolakan besar-besaran permintaan suaka. Menurut catatan 1999, hanya ada 80.000 orang yang memperoleh ijin menetap di Perancis, sementara 63.000 orang ditolak permohonannya, dan masih ada 1.000 permohonan yang masih diproses.

Legalisasi pendatang ilegal ini menimbulkan debat terutama di antara partai politik kiri dan kanan. Partai sayap kiri cenderung mendukung proses legalisasi para imigran gelap ini dengan mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada mereka dan menghentikan pengusiran untuk alasan apa pun. Sebaliknya sayap kanan justru amat menentang dengan menyetujui pengusiran seluruh imigran gelap dari Perancis. Pandangan ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintahan Sarkozy yang pada 2009 telah mengusir 29.000 imigran gelap. Kebijakan migrasi ferme et juste (tertutup dan adil) masih berlangsung saat ini dengan pengusiran lebih dari 700 orang pendatang gelap Roms yang kerap dianggap meresahkan masyarakat dengan berbagai tindakan kriminal. Pengusiran besar-besaran ini memicu reaksi keras dunia internasional yang menganggap Perancis sebagai negara rasis.[[15]](#footnote-16)

1. **Penembakan Charlie Hebdo**

Pada 7 Januari 2015, tiga pria bersenjata melakukan penyerangan d kantor Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang dan 5 orang mengalami luka serius. Dua di antara yang tewas merupakan petugas kepolisian. Penembakan ini dilakukan oleh dua tersangka utama yang bersaudara warga Perancis keturunan Aljazair yang bernama Said dan Cherif Kouachi. Penembakan ini di latar belakangi aksi balas dendam yang sebelumnya majalah Charlie Hebdo memuat kartun yang mengejek Nabi Muhammad.[[16]](#footnote-17)

1. **Tragedi Paris Attack**

Pada malam hari tanggal 13 November 2015, serangkaian serangan teroris terencana; penembakan massal, bom bunuh diri, dan penyanderaan terjadi di Paris, Perancis dan Saint-Denis, kota pinggiran sebelah utara. Sejak pukul 21:16 waktu Perancis, terjadi enam penembakan massal dan tiga bom bunuh diri terpisah dekat Stade de France. Serangan paling mematikan terjadi di teater Bataclan, lokasi penyanderaan dan tembak-menembak antara pelaku dan polisi yang berakhir pukul 00:58 tanggal 14 November.

Sedikitnya 129 orang tewas, 89 di antaranya di teater Bataclan. 352 orang lainnya cedera dalam serangan ini, termasuk 99 penderita luka serius. Selain korban sipil, enam pelaku tewas dan pihak berwenang masih terus memburu pelaku lain. Sebelum serangan terjadi, pemerintah Perancis meningkatkan kewaspadaan setelah serangan Januari 2015 di Paris yang menewaskan 17 orang, termasuk warga sipil dan polisi. Pukul 23:58, Presiden François Hollande mengumumkan keadaan darurat untuk pertama kalinya sejak kerusuhan 2005 dan menutup perbatasan Perancis untuk sementara. Jam malam diberlakukan di Paris untuk pertama kalinya sejak 1944.

Tanggal 14 November, Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Motif NIIS adalah balas dendam atas keterlibatan Perancis dalam Perang Saudara Suriah dan Perang Saudara Irak. Hollande mengatakan bahwa serangan ini sudah direncanakan dari luar negeri "oleh Daesh," singkatan NIIS dalam bahasa Arab, "dengan bantuan di dalam negeri," dan mencap serangan ini sebagai "tindakan perang." Serangan ini merupakan aksi paling mematikan yang terjadi di Perancis sejak Perang Dunia II dan di Uni Eropa sejak bom kereta api Madrid tahun 2004.

Sedikitnya dua penembakan dan tiga ledakan terjadi di Paris. Penembakan dilaporkan terjadi di Rue de la Fontaine-au-Roi, Rue de Charonne, dan Rue Bataclan. Beberapa lokasi ledakan dan penyerangan:

Petit Cambodge dan Le Carillon

Penembakan di restoran Petit Cambodge ("Little Cambodia") di arondisemen Paris ke-10 menewaskan empat orang. Para pelaku juga menembak orang-orang di luar bar Le Carillon dekat Canal Saint-Martin. Menurut Associated Press, 11 orang tewas dalam serangan restoran tersebut.

Penembakan teater dan penyanderaan teater Bataclan

Penembakan kedua terjadi di teater Bataclan di arondisemen Paris ke-11. Band rock Amerika Serikat Eagles of Death Metal saat itu sedang pentas di sana. Jesse Hughes, vokalis utamanya, keluar gedung lewat belakang panggung. Sekitar 60 sampai 100 orang disandera. Korban yang selamat dari serangan ini mengatakan bahwa pelaku menyebutkan Suriah dan di sana terdapat lima atau enam pelaku. Polisi dan tim medis yang tiba di lokasi kejadian ikut diserang. Salah seorang pelaku dilaporkan memegang bahan peledak. Julien Pierce, wartawan Europe 1, mengaku melihat sejumlah orang bersenjata masuk Bataclan, dua atau tiga di antaranya tidak mengenakan penutup wajah, dan melepaskan tembakan secara membabi buta ke kerumunan penonton. Serbuan polisi ke Bataclan menewaskan dua atau tiga pelaku. Penyanderaan berakhir pukul 0:58 CET. Kepolisian Perancis melaporkan bahwa kurang lebih 100 orang tewas di teater ini.

Ledakan Stade de France

Sedikitnya 10 orang cedera atau tewas dalam ledakan di bar dekat Stade de France di kota pinggiran Saint-Denis. Presiden Perancis, François Hollande, sedang menghadiri pertandingan persahabatan sepak bola antara Perancis dan Jerman. Hollande segera diungsikan dari stadion dan bertemu Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve untuk merumuskan langkah selanjutnya untuk menghadapi situasi ini.

Ledakan mal dan penembakan Les Halles

Penembakan dan pengeboman dilaporkan terjadi di pusat perbelanjaan Forum des Halles di pusat kota Paris.

Akibat penyerangan ini dilaporkan 129 orang tewas dan 352 orang terluka, 99 orang dari korban terluka dalam kondisi kritis. Semua penyerang ditemukan tewas dan salah satu di antaranya terdapat kartu identitas warga Perancis.[[17]](#footnote-18)

1. Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional,* Bandung: Nuansa Cendekia, 2015, hlm. 233. [↑](#footnote-ref-2)
2. “Imigrasi”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi, diakses 8 febuari 2016. [↑](#footnote-ref-3)
3. “Pengertian Imigrasi”, Indonesia, 24 Oktober 2010, dalam http://www.sosialdua-imigrasi.blogspot.co.id/2010/10/pengertian-imigrasi\_24.html?m=1., diakses 30 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad Muhammad, “*Globalisasi dan Migrasi: Problematika Integrasi Imigran Turki ke dalam Masyarakat Jerman*”, dalam http://ahmad\_m-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\_detail-67268-Umum-Globalisasi%20dan%20Migrasi:%20Problematika%20Integrasi%20Imigran%20Turki%20ke%20dalam%20Masyarakat%20Jerman.html., diakses pada 16 Oktober 2015 pukul 14.50. [↑](#footnote-ref-5)
5. Khasan Ashari, Op.Cit., hal. 169. [↑](#footnote-ref-6)
6. Khasan Ashari, Op.Cit, hal. 275 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Muhammad, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-8)
8. Khasan Ashari, Op.Cit, hal. 173. [↑](#footnote-ref-9)
9. Andrie K Wardana, “Penanganan Imigran Gelap”, Indonesia, 18 Agustus 2009, dalam http://www. nationfortressonline.blogspot.co.id/2009/08/penanganan-imigran-gelap.html, diakses 30 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-10)
10. Khasan Ashari, Op.Cit [↑](#footnote-ref-11)
11. Noripin, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm.105-106 [↑](#footnote-ref-12)
12. Andrie K Wardana, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-13)
13. “Perancis”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Perancis, dikases 8 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-14)
14. Schor, Ralph, *Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXè siècle à nos jours*, Armand Collin, Paris : 1996. Hal. 273. [↑](#footnote-ref-15)
15. ‘’Dinamika Imigran di Perancis”, dalam https://witakania.wordpress.com/tag/imigran/, diakses 28 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-16)
16. “Pelaku Penembakan Charlie Hebdo: Kami Siap Mati Syahid”, dalam www.merdeka.com/dunia/pelaku-penembakan-charlie-hebdo-kami-siap-mati-syahid.html, diakses 28 Febuari 2016. [↑](#footnote-ref-17)
17. “Satu Pelaku Serangan di Paris Adalah Warga Prancis”, dalam internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/11/15/nxtyrj382-satu-pelaku-serangan-di-paris-adalah-warga-prancis, diakses 28 Febuari 2016. [↑](#footnote-ref-18)